

PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN PASIR DI DAERAH ALIRAN SUNGAI INDRAGIRI

Oleh: Murnita Sari

Pembimbing : Dadang Mashur

Program Studi Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl.H.R Soebrantas Km 12,5 Simp, Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Mining, from to environmental side, is considered to be the most destructive compared to other exploitation of natural resources, which is why supervision is needed.. This study aims to find out the supervision of sand mining business at Indragiri river flow area, and to find out the inhibiting factors for the supervision of sand mining business at Indragiri river flow area, Rengat Barat District, Indragiri Hulu Regency. This study uses the theory of supervision stages by Manullang to analyze the supervision of sand mining business at Indragiri river flow area, Rengat Barat District. The theory consists of determining a measuring device (standard), assessment action, and corrective action. The type of the study is qualitative, using interview method, observation, and documentation. This study found that the supervision of sand mining business Supervision of sand mining business didn't have much significant changes, causing the impacts such as abrasion, polluted river water, and damaged infrastructure which is the road used by residents at Indragiri river flow area to carry out activities, because there are still miners who don't obey the rules and thus damage the environment. This is due the inhibiting factors of supervision such as the lacking of supervision officer's quantity, limited operational fund, and lacking of the miners' obedience.

Keywords : Supervision, sand mining business and mining at river flow area

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya alam di negara Indonesia ini yang sebagian wilayahnya berupa daratan menyimpan banyak kekayaan alam yang berbeda-beda, salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dari sisi lingkungan hidup, pertambangan dianggap paling merusak dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan eksploitasi sumber daya alam lainnya. Pertambangan dapat merubah bentuk bentang alam, merusak atau menghilangkan vegetasi, menghasilkan limbah tailing, maupun batuan limbah, serta menguras air tanah dan air permukaan.

Untuk tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dalam pertambangan maka diperlukan dilakukan pengawasan. pengawasan sangatlah penting dan diperlukan karena tanpa adanya pengawasan, lingkungan akan semakin rusak. Pengawasan juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya tercapainya kesuksesan tugas pemerintah dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pengawasan ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus untuk menghentikan lebih dini adanya pelanggaran agar terhindar dari akibat yang lebih buruk.

Usaha pertambangan pasir di daerah aliran sungai Indragiri Kecamatan Rengat Barat menyebabkan kerusakan pada lingkungan terutama pada tingkat abrasi sedangkan pemukiman penduduk sebagian besar berada dipinggir sungai. Selain itu pertambangan menyebabkan kondisi air sungai menjadi tercemar serta rusaknya jalan. Dampak dari rusaknya jalan ini mengakibatkan penurunan

jumlah konsumen yang membeli hasil tambang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengawasan usaha pertambangan pasir di daerah aliran sungai Indragiri?
2. Apa faktor yang menghambat dalam proses pengawasan usaha pertambangan pasir di daerah aliran sungai Indragiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengawasan terhadap usaha pertambangan pasir di daerah aliran sungai Indragiri.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat proses pengawasan usaha pertambangan pasir di daerah aliran sungai Indragiri

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian mengenai masalah ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
 1. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah serta penulis menerapkan teori-teori yang di dapat selama perkuliahan dalam memecahkan masalah dan mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut.

2. Sebagai bahan perkembangan disiplin Ilmu Administrasi publik khususnya dibidang pengawasan.
- b. Secara Praktis
1. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.
 2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau maupun pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

1.5 Konsep Teori

1. Pengawasan

Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak, menurut Sujamto (2004 :12). Dilanjutkan lagi dengan pendapat Sarundajang (2005 :240) bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai rencana.

Menurut George R Terry dalam Manullang (2015;172) pengawasan adalah menentukan apa yang ingin dicapai, mengevaluasi, menerapkan tindakan perbaikan jika diperlukan untuk memastikan hasil apakah sesuai dengan rencana.

Menurut Winardi (2008 :161) terdapat faktor-faktor yang mengharuskan adanya pengawasan yaitu

1. Sasaran-sasaran individual dan organisasi biasanya berbeda;

(maka demikian diperlukan adanya pengawasan untuk memastikan bahwa anggota-anggota bekerja kearah sasaran-sasaran organisator)

2. Pengawasan diperlukan, disebabkan oleh karena terdapat adanya satu keterlambatan antara waktu sasaran dan sewaktu mereka direalisasikan.

Menurut Siagian dalam Effendy (2015,225) ada dua macam bentuk pengawasan yaitu

- a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan dengan melakukan observasi langsung terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk; Inspeksi langsung

- b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan tidak langsung ini dapat berbentuk tertulis dan lisan.

Menurut Manullang (2015;177) berdasarkan waktu pengawasan dilakukan, maka pengawasan dapat dibedakan menjadi :

- a. pengawasan *preventif*

dimaksudkan pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau *deviation*.

- b. Pengawasan *repressif*

dimaksudkan pengawasan setelah rencana sudah dijalankan dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Pengawasan juga dibedakan menurut objek pengawasan, menurut Beishline dalam Manullang (2015;177) pengawasan menurut objek pengawasan dibedakan atas:

1. Kontrol administratif yaitu berurusan dengan tindakan dan pikiran.
2. Kontrol operatif yaitu untuk bagian terbesar berurusan dengan tindakan.

Menurut Kartono (2002:153) Pengawasan melekat adalah kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara struktural, yang dilakukan secara kontiniu dan berkesinambungan. indikator pengawasan yang akan dipergunakan dalam pengukuran variabel ini adalah sebagai berikut.

1. Menentukan adanya ukuran pelaksanaan. Artinya cara-cara untuk mengukur pelaksanaan seperti kontiniu atau beberapa syarat minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiap hari.
2. Memberikan penilaian. Artinya memberi nilai kesetiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaannya baik atau buruk.
3. Mengadakan korektif. Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu

tinggi dan eksternal yaitu memberikan sanksi kepada bawahan.

Menurut Terry (2009;395) pengawasan terdiri dari pola suatu proses yang dibentuk oleh macam langkah-langkah yang bersifat universal, yaitu:

1. Mengukur hasil pekerjaan.
2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (apabila ada perbaikan).
3. Mengkoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

Handoko(2003;361),mengklasifikasikan tipe pengawasan menjadi tiga tipe, yaitu:

1. pengawasan pendahuluan (*feedforward control*). Pengawasan pendahulu untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar satu tujuan serta memungkinkan koreksi dibuat sebelum tahap kegiatan tertentu selesai.
2. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*). Pengawasan ini, sering dilakukan selama sesuatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui terlebih dahulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam perlatan “double chock” yang lebih

menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

3. Pengawasan umpan balik (*feedback control*). Pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai *past-action controls*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan datang.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam melaksanakan pengawasan menurut Darwis (2000;31) haruslah berpatokan pada prinsip-prinsip dari *controlling* tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Titik kontrol strategis, kontrol terbaik hanya bisa diperoleh apabila titik-titik kritis didefinisir dan perhatian khusus diuraikan pada penyesuaian titik-titik tersebut
2. Umpan balik, yakni proses pencapaian informasi yang lalu terhadap kegiatan yang akan datang
3. Kontrol yang fleksibel, setiap sistem kontrol harus peka terhadap perubahan kondisi
4. Kesesuaian organisasi, yaitu agar kontrol terpola untuk kebutuhan organisasi
5. Kontrol diri, disini dimaksudkan bahwa tiap unit dapat mengontrol unit itu sendiri, karena masing-masing unit mempunyai tujuan
6. Kontrol langsung, maksudnya setiap sistem kontrol harus didesain sedemikian untuk

memelihara kontak langsung secara pengontrol dengan yang dikontrol.

Pelaksanaan pengawasan yang efektif menurut Handoko (2005;373), yaitu:

1. Akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan yang koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilaksanakan segera.
3. Objektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif secara lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang mengakibatkan kerusakan paling fatal.
5. Realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi

7. Terkoordinasi dengan aliran kerja nasional. Informasi pengawas harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena (1) setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi dan (2) informasi pengawasan harus sampai pada seluruh penelitian yang memerlukannya
8. Fleksibel. Pengawasan harus memiliki fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman atau kesempatan dari luar.
9. Bersifat sebagai petunjuk operasional sistem pengawasan yang efektif.

Menurut Manullang (2015:184) dalam pelaksanaan tugas pengawasan, untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasikan tujuan harus pula dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan. Proses pengawasan dimanapun atau pengawasan yang berobjekkan apapun terdiri dari beberapa fase sebagai berikut:

1. Menetapkan alat pengukur (standar), alat penilaian atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan.
2. Mengadakan penilaian (*evaluate*). Fase kedua dalam proses pengawasan adalah menilai atau evaluasi. Dengan demikian dimaksudkan

membandingkan hasil pekerjaan (*actual result*) dengan alat ukur (standar) yang sudah ditentukan

3. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*) Hal pertama yang perlu dianalisis yaitu apa yang menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Maka perlunya laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas, ketika sudah diketahui apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan barulah tindakan perbaikan diambil.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka pengawasan dapat penulis simpulkan sebagai suatu kegiatan atau proses untuk mengawasi, membimbing dan membina unit kerja dalam pelaksanaan suatu kegiatan dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan yang ada sehingga tujuan yang diinginkan tercapai.

Jadi dalam melakukan pengawasan tidak semata-mata untuk mencari kesalahan-kesalahan tetapi mengoreksi dan memperbaiki segala tindakan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Inilah sebenarnya yang menjadi hakikat dan tujuan dari pengawasan.

2. Pencemaran Lingkungan

Menurut Mitchell (2016:9) kegiatan manusia dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau kelangkaan sumber daya dalam tiga cara.

1. kegiatan manusia dapat menyebabkan penurunan jumlah dan kualitas sumber

daya, terutama jika sumbernya dieksploitasi dengan tingkat kecepatan yang melebihi daya pulihnya. Dikatakan bahwa manusia hidup lebih banyak mengorbankan sumber daya alam daripada untuk kepentingan sumber daya tersebut.

2. Penurunan atau kelangkaan sumber daya di sebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk.
3. Akses terhadap lingkungan dan sumber daya tidak seimbang biasanya akan menyebabkan banyak persoalan.

Jenis-jenis bahan pencemar diklarifikasikan oleh Ramade dalam Sembel (2015:41) ke dalam tiga kelompok utama menurut sifatnya, yaitu:

1. Bahan pencemar fisik, seperti radiasi ionisasi dan pencemar ternal.
2. Pencemar kimiawi, yang terdiri dari hidrokarbon dan produk-produknya yang berasssaaal dari pembakaran, bahan-bahan plastik, pestisida, detergen, senyawa-senyawa organik sintesis, turunan sulfur, nitrat, fosfat, logam-logam berat, flourida dan partikel-partikel mineral.
3. Pencemar hayati, yaitu bahan-bahan organik yang sudah membusuk, mikroorganisme potogenik

Manik (2007:31) mengatakan pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau

komponen lain kedaam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan lain kedalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya (Manik, 2007:32).

Menurut Sastrawijaya (2000:16) suatu lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila terjadi perubahan-perubahan dalam tatanan lingkungan itu sehingga tidak sama lagi dengan bentuk asalnya, sebagai akibat dari masuk dan atau dimasukkannya sutau zat atau benda asing ke dalam tatanan lingkungan itu. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari memasukkan benda asing itu memberikan pengaruh (dampak) buruk terhadap organisme yang sudah ada dan hidup dengan baik dalam tatanan lingkungan tersebut. Sehingga pada tingkat lanjut dalam arti bila lingkungan tersebut telah tercemar dalam tingkatan yang tinggi, dapat membunuh bahkan menghapus suatu atau lebih jenis organisme yang tadinya hidup normal dalam tatanan lingkungan itu. Jadi pencemaran lingkungan adalah terjadinya perubahan dalam suatu tatanan lingkungan asli menjadi suatu tatanan baru yang lebih buruk dari tatanan aslinya.

Berikut jenis-jenis pencemaran lingkungan dalam Suherti dkk (2009:27):

1. Pencemaran air, pencemaran air bisa terjadi di sungai, danau, laut dan air dalam tanah. Pencemaran air biasanya disebabkan oleh sampah atau cairan limbah buangan yang bercampur dengan air bersih. Air yang tercemar tidak bisa digunakan untuk minum dan membersihkan badan. Air tercemar bisa diketahui dari bau, warna dan rasanya.
2. Pencemaran Udara adalah asap yang dihasilkan oleh kendaraan, cerobong pabrik atau kebakaran hutan. Asap yang dikeluarkannya mengandung zat-zat berbahaya yang mengganggu kesehatan makhluk hidup . jika udara yang tercemar dihirup, akan terasa menyesak dada.
3. Pencemaran Suara. Suara kendaraan dan getaran mesin adalah penyebab pencemaran suara. Selain itu, bila kamu menyalakan musik dengan suara yang keras sehingga mengganggu orang lain, juga termasuk pencemaran suara. Pencemaran suara bisa menyebabkan kerusakan pada pendengaran kita.

Syarat mutlak untuk disebut suatu lingkungan telah tercemar haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Masuk atau dimasukkannya komponen-komponen (mahluk hidup, zat, energi dll).

2. Ke dalam lingkungan atau ekosistem lingkungan
3. Kegiatan manusia.
4. Timbul perubahan atau menurunkan mutu yang lebih rendah hingga ke tingkat tertentu.
5. Fungsi lingkungan menjadi berkurang atau tidak dapat berfungsi
6. Menurut peruntukannya

Dari unsur-unsur pencemaran lingkungan tersebut diatas, nyaaalah bahwa suatu perbuatan atau aksi yang menimbulkan keadaan sebagai pencemaran lingkungan hidup haruslah memenuhi berbagai unsur tersebut (Siahaan, 2004:236).

1.5 Metode Penelitian

Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu berusaha memaparkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan fenomena-fenomena yang ada serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang ada serta menelusuri fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan hasil penelitian yaitu pengawasan usaha pertambangan pasir di Daerah Aliran Sungai Indragiri

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Riau dan Daerah Aliran Sungai Indragiri di Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Rengat Barat.

1.5.2 Informan Penelitian

Adapun key informan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau
2. Inspektur Tambang
3. Pemilik Izin Usaha Pertambangan.

Adapun informan susulan tersebut adalah:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
2. Masyarakat sekitar pertambangan di Daerah Aliran Sungai Indragiri Kecamatan Rengat Barat

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Menurut Sugiyono (2007:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah sumber data primer dan skunder, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi partisipan dan wawancara mendalam.

1.5.4 Sumber Data

1. Data Primer

Adalah informasi yang diperoleh langsung dari informasi melalui wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, yaitu meliputi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau faktor-faktor yang mempengaruhi proses

pembinaan dan pengawasan Pertambangan Pasir di Daerah Aliran Sungai Indragiri Kabupaten Indragiri Hulu serta mengenai indikator menentukan standar pengawasan, mengukur pelaksanaan yang telah dicapai, melakukan tindakan koreksi atau perbaikan serta sanksi terhadap pelanggaran tertentu.

2. Data Sekunder

Adalah data yang digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah yang akan diteliti yang diperoleh oleh kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau sebagai berikut:

- a. Gambaran umum tentang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau
- b. Fungsi dan tugas setiap bidang pertambangan batuan mineral Provinsi Riau.
- c. Jumlah sumber daya pasir di Kabupaten Indragiri Hulu.
- d. Jumlah pertambangan pasir di Daerah Aliran Sungai Kabupaten Indragiri Hulu.
- e. Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP)

1.5.5 Analisis Data

Analisis data yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis dengan kualitatif eksploratif.

1.6 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang pengawasan usaha pertambangan pasir di Daerah Aliran Sungai Indragiri Kabupaten Indragiri Hulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan usaha pertambangan pasir yang merupakan golongan batuan di Kecamatan Rengat Barat dapat dikatakan belum berhasil, dikarenakan masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penambang yaitu tidak adanya kolam pengendapan yang digunakan untuk menyaring air tambang sebelum dialiri kembali ke sungai, jalan yang rusak akibat tidak memadainya jalan pertambangan dan jarak pertambangan dengan pinggir sungai yang terlalu dekat sehingga menjadi abrasi hal ini meresahkan masyarakat sekitar pertambangan. Hal ini berdasarkan hasil penelitian terhadap usaha pertambangan pasir di DAS Indragiri kecamatan Rengat Barat dan berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektur Tambang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. Pengawasan ditetapkan menurut Keputusan Menteri Nomor Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai

penetapan alat ukur untuk pekerjaan pembangunan. Namun hal ini belum dilaksanakan oleh penambang di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Kelemahan pengawasan terhadap usaha pertambangan pasir ini adalah jumlah dilakukannya inspeksi

2. Kuantitas personil sangat mempengaruhi didalam pengawasan yang melakukan pengawasan karena luas wilayah pertambangan yang begitu luas sedangkan jumlah pengawas berjumlah 3 orang, dana atau biaya juga ikut mempengaruhi didalam pengawasan karena jika tidak adanya dana operasional maka pekerjaan tidak dapat berjalan lancar, serta kepatuhan penambang juga dituntut untuk ikut serta dalam dilakukannya pengawasan karena ketaatan penambang membantu terwujudnya tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pengawasan

1.7 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang berjudul Pengawasan Usaha Pertambangan Pasir di Daerah Aliran Sungai Indragiri Kabupaten Indragiri Hulu, penulis memberikan saran-saran yang sifatnya membantu yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan dapat menambah anggaran terhadap pengawasan usaha pertambangan pasir agar pengawasan dapat berjalan dengan baik.
 2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau harus melakukan penambahan petugas sehingga tidak terjadi tumpah tindih dalam pekerjaan saat melakukan penijauan dilapagan.
 3. Diharapkan para pemilik pertambangan pasir agar dapat memperhatikan semua syarat untuk melakukan pertambangan.
 4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau harus memberikan sanksi ataupun denda besar yang bisa membuat jera kepada para pelaku usaha pertambangan pasir yang melakukan pertambangan tidak sesuai dengan peraturan.
- Manullang, (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Mitchell,B, dkk, (2016). *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sarundajang, H, (2005). *Babak Baru Sistem Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka
- Sastrawijaya, A.T, (2000). *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sembel, Dantjie, (2015). *Toksikologi Lingkungan*. Yogyakarta: Andi
- Siagian, Sondang P, (2015). *Asas Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Siahaan, (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga
- Sujamto, (2004). *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: PT.Pustaka Quantum
- Terry R, George, (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- _____, (2009). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara: Jakarta
- Winardi, (2008). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Rinaka Cipta: Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Beishline, (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Handoko, (2005). *Manajemen Perubahan*. Bandung: Alfabeta
- Manik, K.E.S, (2007). *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Djamban